# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Priscilla Prawati Tabita Marpaung
NPP. 30.0282

*Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Riau*
*Program Studi Kebijakan Publik*

Email : priscillaprawati.tm@gmail.com

Pembimbing Skrips: Dr. Muhadam Labolo, M.Si

## ABSTRACT

***Problem Statement/Background (GAP):*** *This study raises the title, Implementation Of Policies For Advancement Of Malay Culture Based On Regional Regulation Number 1 Of 2018 In Batam City Riau Kepulauan Province.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to find out how the implementation of policies for the advancement of Malay culture through Regional Regulation Number 1 of 2018 in Batam City and the inhibiting factors and supporters in the implementation of the policy.* ***Method:*** *The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The focus in this study uses Hamdi's theory, namely productivity, linearity and efficiency.* ***Result:*** *Based on the results of the research, it shows that the implementation of the policy for the promotion of Malay culture based on Regional Regulation No. 1 of 2018 has been going quite well, this can be seen from the progress of the implementation of the promotion of Malay culture in Batam City and the fulfillment of indicators in policy implementation.* ***Conclusion:*** *The supporting factors are the support from the local government along with the budget and facilities that are fulfilled. While the inhibiting factor is the lack of initiative and community participation in participating in the implementation of the promotion of Malay culture in Batam City.*

**Keywords:** Implementation, Culture, Malay

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini mengangkat judul, Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 i Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam serta faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori Hamdi yaitu Produtktfitas, Linearitas dan Efisiensi. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 sudah berjalan, hal ini terlihat dari kegiatan penerapan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam serta telah terpenuhinya indikator-indikator dalam implementasi kebijakan. Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah beserta anggaran dan fasilitas yang dipenuhi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih kurangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam. **Kesimpulan:** Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 sudah berjalan cukup baik



**Kata Kunci :** Implementasi, Kebudayaan, Melayu


## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indoensia yang juga merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Kota ini juga dikenal dengan kota industri, dimana terdapat banyak perusahaan asing yang bermukim di sana. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya dibutuhkan pekerja yang banyak, sehingga para pendatang, baik dari dalam maupun luar negeri ramai berbondong-bondong memadati Kota Batam. Hal ini menyebabkan Kota Batam sebagai kota industri memberi dampak pada keberagaman suku.

Dalam upaya menyelaraskan keberagaman tersebut, Pemerintah Daerah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Melayu. Perda ini terbit sebagai upaya untuk tetap melestarikan Kebudayaan Melayu yang notabene adalah identitas asli Kota Batam, seiring maraknya pendatang dari daerah lain. Selain itu, Perda ini juga sebagai tanggapan dari pemerintah daerah terhadap wacana nasional, mengenai keberagaman budaya nasional dengan menjaga budaya-budaya yang ada di daerah.

Budaya melayu yang merupakan komponen budaya bangsa dan aset bangsa memiliki nilai dan norma sosial budaya yang menjadi pedoman sikap dan tindakan warganya. Ide dan cara hidup masyarakat Melayu tercermin dalam kepercayaan, seni, adat istiadat, dan praktik budaya lainnya. Masyarakat Melayu memiliki cita-cita moral yang tinggi yang tercermin dalam sikap dan ideologinya. Melayu merupakan salah satu dari kaum minoritas yang wujud. Jika dirujuk kepada maklumat bancian rasmi yang terdapat di dalam Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010, suku bangsa Melayu merupakan yang ke-10 terbesar

Dalam mengimplementasikan kebijakan pemajuan kebudayaan melayu yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, masih kurang maksimalnya potensi yang ada dan belum ada inisiatif dalam menindaklanjuti pemajuan kebudayan melayu, penyelenggaraan

implementasi kebijakan perlu dilakukan oleh pihak dinas kebudayaan dan pariwisata serta masyarakat yang ikut serta dalam mencapai pemajuan kebudayaan melayu yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan kondisi yang telah diungkapkan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun kesenjangan yang menjadi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yakni ialah fakta bahwa mayoritas masyarakat Kota Batam yang penduduknya merupakan suku melayu yang juga merupakan 10 besar suku terbanyak di wilayah Indonesia perlu untuk menjaga kebudayaan melayu tetap terjaga. Sementara itu tantangan yang dihadapi ialah, masih kurang maksimalnya potensi yang ada dan belum ada inisiatif dalam menindaklanjuti pemajuan kebudayan melayu, penyelenggaraan implementasi kebijakan perlu dilakukan oleh pihak dinas kebudayaan dan pariwisata serta masyarakat yang ikut serta dalam mencapai pemajuan kebudayaan melayu yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut di atas, sangat penting untuk mempertahankan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membimbing budaya Melayu. Oleh karena itu maka perlu adanya aturan daerah tentang pengembangan budaya melayu agar upaya memajukan budaya melayu dapat dilakukan dan dikelola secara efektif.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Ketut Widia (2019) berjudul, Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Menjadikan Kalimantan Timur Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui jenis kebudayaan yang mendesak untuk dikembangkan dan dimajukan dalam rangka menjadikan Kalimantan Timur menjadi tujuan wisata berkelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa macam kebudayaan Kalimantan Timur yang mendesak untuk dimajukan yaitu suku, bahasa daerah, lagu daerah, senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, desa adat.

Selanjutnya penelitan yang dilakukan oleh Eko Bintan Nugroho (2020), dengan judul Pengembangan Wisata Berbasis Kebudayaan Melayu Di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Fokus penelitian ini adalah pengembangan Objek Wisata Cagar Budaya tepatnya di Pulau Penyengat agar wisatawan lokal maupun manca negara puas terhadap kondisi pariwisata yang ada dalam pemajuan kebudayaan melayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya yaitu Cagar Budaya di Pulau Penyengat dapat memperkuat kepribadian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemudian penelitian Rama Wijaya Hadiarta (2020), Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Fokus penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Buru dalam mengatasi hambatan dalam impelemntasi peraturan terkait rencana pembangunan pariwisata di Kabupaten Buru. Hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Buru meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah dengan adanya meningkatkan infrastruktur serta fasilitas yang mempuni.

## 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam. Adapun fokus yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya ialah penulis menyadari

pentingnya memajukan budaya melayu sebagai budaya lokal untuk itu penulis ingin melihat bagaimana upaya pemerintah melalui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam. Selain itu untuk menganalisis rumusan masalah peneliti menggunakan variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi (2014:105). Terdapat tiga faktor yaitu produktifitas, linearitas, dan efisiensi.

### 1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu, kemudian untuk mengetahui pemajuan potensi yang ada saat ini pada unsur kebudayaan teknologi tradisional.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan atau topik peneliian yang diangkat oleh penulis.Yang mana pada konteks ini ialah Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam. Selain itu penulis mengumpulkandata melaui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam (sebanyak 1 orang), Kepala Bidang Kebudayaan (sebanyak 1 rang), Kepala seksi Kebudayaan (sebanyak 1 orang), Lembaga Adat Melayu Kota Batam(LAM) (sebanyak 1 orang), pelaku kesenian (sebanyak 5 orang).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Batam

Kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Melayu di wilayah tersebut. Kebijakan ini meliputi berbagai macam program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan budaya Melayu kepada masyarakat Kota Batam.

1. Kebijakan Anggaran Dalam Merealisasikam Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam formular Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam rencana kinerja tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA awal tahun 2019. Komponen rencana kinerja memuat tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam pada tahun 2019 telah menetapkan 10 kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Renstra.

a. Produktivitas

Untuk mengetahui produktivitas dari implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu peneliti mencari data terkait realisasi kinerja yang dicapai yang dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja terkait sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya menetapkan sasaran kinerja untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dan hasil tersebut dapat dievaluasi sebagai gambaran sejauh mana pelaksanaan sasaran kinerja tersebut dilaksanakan. Dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya dalam pencapaian indikator kinerja.

b. Linearitas

Linearitas berkenaan dengan kesesuaian proses untuk pemenuhan standar dengan petunjuk atau pedoman dan aturan yang telah di tetapkan sebelumnya. Adapun acuan dalam pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam yaitu Pearturan Derah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu. Dalam dimensi linearitas, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti indikator prosedur, anggaran, biaya, waktu dan tempat.

Pengertian prosedur adalah serangkaian ketetapan yang telah dirumuskan untuk menjadi patokan tentang bagaimana sebuah kegiatan dilakukan. Prosedur pemajuan kebudayaan Melayu adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, hal ini dikarenakan kebudayaan Melayu sebagai warisan sejarah dan bagian dari kebudayaaan nasional yang merupakan aset bangsa maka perlu dilakukan pemajuan Kebudayaan Melayu.

Anggaran yang digunakan untuk pemajuan kebudayaan Melayu adalah anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah yang mempunyai target yaitu memajukan Kota Batam sebagai kota pariwisata Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam selalu dijalankan dan tidak ada jangka waktu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu berupaya melaksanakan tugas dalam pemajuan kebudayaan Melayu agar tidak berhenti. Dari pernyataan wawancara yang dilaksanaan penulis dapat diketahui bahwa waktu yang diperlukan tidak ada melainkan akan selalu dijalankan. Seiring berjalannya waktu, proses pemajuan kebudayaan Melayu perlu diperhatikan selalu sebagai warisan budaya agar selalu melekat.

Pemajuan Kebudayaan Melayu pada umumnya merupakan wewenang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah setempat. Dalam pelaksanaannya adapun lokasi hasil kebijakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata misalnya pabrik batik tulis yang ada di lantai dasar gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pabrik ini khusus memproduksi batik tulis khas Melayu dengan motif Gong-Gong yang merupakan ciri khas Melayu. Selanjutnya ada Museum Batam yang letaknya sangat strategis di tengah Kota Batam yang berdekatan dengan Gedung Pemerintah Kota Batam. Ada juga destinasi Dendang Melayu yang belokasi di Jembatan Barelang.

Mengacu kepada pembahasan yang telah dijelaskan peneliti mengenai beberapa indikator pada dimensi linearitas dapat disimpulkan bahwa indikator prosedur, angaran, biaya dan tempat telah terlaksana dengan baik dan sesuai. Namun perlu ditingkatkan secara terus menurus untuk memajukan budaya Melayu lebih menarik lagi sebagai warisan budaya yang tidak pudar.

c. Efisiensi

Adapun untuk mengukur tingkat efisiensi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang merupaka salah satu program kebijakan dari pemeritah ada dua indikator yang digunakan yaitu indikator pelaksana dan teknologi:

1. Pelaksana

Menurut hasil observasi peneliti ketika melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu, sejauh ini memang terlihat proses pengembangan wisata Kota Batam semakin maju dalam mengenalkan budaya Melayu. Hal ini dapat diketahui wisatawan semakin banyak tentang budaya Melayu di kota Batam sebagai kota pariwisata. Mengacu kepada penelitian mengenai dimensi efisiensi pelaksana, maka dapat peneliti simpulkan bahwa unsur pelaksana untuk

pemajuan kebudayaan Melayu berjalan sesuai kebijakan dan teknis yang ada. Pelaksanaan pemajuan kebudayaan Melayu dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lebih terfokus.

2. Teknologi

Indikator teknologi menuntut adanya penggunaan bantuan teknologi yang maksimal sehingga mampu membantu mudahnya pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan Melayu. Dalam pelaksanaan ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota yang bertugas di Museum Batam menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kunjungan ke Museum Batam tersedia tiket masuk yang dapat dilakukan transaksi melalui tunai maupun QRIS dalam mempermudah transaksi pengunjung yang datang. Dengan transaksi berbasis digital ini dapat dimanfaatkan dalam proses pemajuan kebudayaan Melayu seperti transaksi kunjungan ke Museum Batam.

### 3.2 Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam

Masyarakat Melayu di Kota Batam yang ada di Kepulauan Riau merupakan masyarakat yang cukup maju namun dalam hal pelesatarian kebudayaan dan pemajuan kebudayaan daerah perlu upaya dan peran pemerintah dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan. Pengaruh budaya luar juga menjadi faktor penghambat pemajuan budaya Melayu. Hal ini dikarenakan letak Kota Batam yang terletak dekat dengan negara lain yang bisa mempengaruhi budaya. Selain itu juga menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah, pelaku serta masyarakat diperlukan lebih peka lagi agar mencapai tujuan bersama dalam pemajuan budaya Melayu di Kota Batam.

### 3.3 Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemajuan KebudayaanMelayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Upaya yang dapat mengatasi faktor penghambat kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu dan menjadikan suatu bentuk yang menjadi ciri khas Kota Batam yang bertahan dapat dilakukan beberapa strategi berikut:

1. Meningkatkan masyarakat berwawasan pariwisata.

   Hal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesan bagi para wisatawan yang datang ke Batam. Sehingga wisatawan merasa masyarakat menyambut baik dan memberikan kesan nyaman untuk berwisata.

2. Penataan dan Peningkatan Objek Pariwisata

   Batam ditetapkan sebagai salah satu Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kawasan Wisata Kota MICES (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition and Sports) sebagai salah satu strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan keunggulan komparatif. Selanjutnya Batam dibagi kedalam 3 wilayah Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP) yaitu KPP Pulau Batam, KPP Pulau Bulang dan Pulau Belakangpadang serta KPP Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, KPP Pulau Batam dibangun khusus untuk industri MICE.

3. Promosi yang efektif

   Media promosi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam adalah sebagai berikut:

   a. Media Cetak

      Media cetak yang gunakan adalah menerbitkan brosur, booklet yang dilengkapi dengan calendar event selama satu tahun, peta wisata serta informasi yangdisampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam yang disebarkan melalui surat kabar.

   b. Media Elektronik

      Media Elektronik yang digunkan adalah pesawat telepon, radio dan internet.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan temuan yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam sudah berjalan cukup baik. Salah satu yang menjadi perhatian dan temuan penulis selama melaksanakan penelitian ialah bahwa implementasi pemajuan kebudayaan melayu di Kota Batam masih mendapat kendala misanya masyarakat yang kurang pengetahuan terhadap budaya melayu. Padahal masyarakat disini memegang peranan penting sebagai pelestari kebudayaan. Oleh karena itu kedepannya perlu diadakan pembekalan kepada masyarakat khususnya pelaku wisata yang masih kurang dalam wawasan pariwisata agar selain memperlancar lapangan pekerjaan juga dapat lebih memahami nilai budaya Melayu. Kemudian perlu juga sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa sadar pentingnya pelestarian
budaya Melayu sebagai identitas Kota Batam.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pemajuan Kebudayaan Melayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam belum berjalan maksimal karena masih terdaat faktor yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pemajuan kebudayaan Melayu, kemudian masuknya budaya luar karena letak Kota Batam yang berbatasan dengan negara lain sehingga memengaruhi budaya masyarakat setempat, dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan masyarakat yang berperan dalam menjalankan kota pariwisata. Karena itu Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan melayu ialah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas *event* yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pemerintah Kota Batam, lalu dapat memberikan perhatian berupa penghargaan kepada pelaku wisata sebagai bentuk apresiasi, setelah itu dapat juga melakukan strategi masyarakat berwawasan pariwisata yang melibatkan masyarakat di sekitar objek wisata, kemudian memberikan sosialisasi bahwa pentingnya budaya Melayu sebagai warisan adat dan ciri khas dari Kota Batam yang perlu dikenal dan dilestarikan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah saja yakni Kota Batam. Selanjutnya dikarenakan implementasi Pemajuan Kebudayaan Melayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 masih berjalan mungkin saja akan ada perubahan dari segi data dan perkembangan kedepannya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan lokasi lainnya berkaitan dengan upaya implementasi Pemajuan Kebudayaan Melayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Hadiarta, Rama. 2020. *Impelemntasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buru Provinsi Maluku*. Maluku : Jurnal.

Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Widia, I. Ketut. 2019. *Pemajuan Kebudayaan Dalam. Rangka Menjadikan Kalimantan. Timur Sebagai Tujuan Wisata. Berkelas Dunia.* Ganaya : Jurnal.

Nugroho, Eko Bintan. 2020. *Pengembangan Wisata Berbasis Kebudayaan Melayu Di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang.* Tanjungpinang : Jurnal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Melayu.

Peraturan Daerah Kabupatem Buruh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata.